

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank (LKBB).

Lembaga perbankan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian suatu negara, karena memiliki fungsi intermediasi atau sebagai perantara antara pemilik modal dengan pengguna dana. Oleh karena itu, kinerja bank merupakan hal yang penting karena merupakan cerminan dari kemampuan bank dalam mengelola aspek permodalan dan asetnya dalam mendapatkan laba, serta implikasi dari fungsi bank sebagai *intermediary*.

Fenomena yang terjadi adalah dimana keadaan perekonomian Indonesia di sektor perbankan mengalami keadaan yang pasang surut. Ketidakstabilan disebabkan karena adanya ancaman globalisasi dan pasar bebas di kancah ekonomi internasional.

Kinerja perbankan Indonesia sepanjang 2011 secara umum meningkat. Profitabilitas menunjukkan peningkatan dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang menurun. Pertumbuhan

kredit, baik rupiah maupun valas, meningkat cukup tinggi. Indikator kinerja bank umum pada tahun 2010 dan 2011 dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**

**Indikator Kinerja Bank Umum (2010 – 2011)**

Indikator	2010	2011
Pertumbuhan kredit ( miliar Rp)	1.765.845	2.200.094
Pertumbuhan DPK (miliar Rp)	2.338.824	2.784.912
CAR (%) *termasuk risiko operasional	17.18	16.05
ROA (%)	2.86	3.03
BOPO (%)	86.14	85.42
LDR (%)	75.21	78.77
NIM (%)	5.73	5.91

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2011, tabel dimodifikasi<sup>1</sup>

Walaupun rasio tersebut menunjukkan peningkatan, namun kinerja perbankan masih belum efisien, hal ini tercermin pada *Net Interest Margin* (NIM) dan BOPO yang masih tinggi. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak cukup tinggi untuk menopang kebutuhan penyaluran kredit. Manajemen bank harus mampu meningkatkan pendapatannya guna memperkecil kemungkinan bank berada dalam kondisi bermasalah sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya.

Buruknya kinerja perbankan bukan hanya dari sisi keuangan, namun *internal control* bank terhadap sumber daya manusia pun masih lemah. Hal inilah yang menjadi titik celah kejahatan perbankan. Sepanjang tahun 2011

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia Vol. 10 No. 1 Desember 2011, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011), hlm. 25.

perbankan diwarnai oleh kasus pembobolan bank, diantaranya adalah kasus pembobolan uang nasabah Citibank senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship manager* (RM) bank tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok yang tersangkanya seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.<sup>2</sup>

Sektor perbankan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perbankan merupakan perusahaan yang dalam kegiatannya berhubungan langsung dengan masyarakat. Kegiatan perbankan begitu dipengaruhi oleh kepercayaan nasabah atau masyarakat luas. Apabila dalam tubuh bank terjadi gejolak maka akan muncul reaksi keras dari masyarakat. Akibat berbagai praktik tata kelola perusahaan yang buruk yang terjadi dalam industri perbankan ini memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Penerapan GCG sangat dibutuhkan untuk seluruh perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada usaha yang membutuhkan. Untuk itu, bank harus beroperasi secara sehat dalam rangka

---

<sup>2</sup>Erlangga Djumena, Inilah 9 Kasus Kejahatan Perbankan, 2011, hlm. 1 (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/03/09441743/Inilah.9.Kasus.Kejahatan.Perbankan>).

menjaga kepercayaan masyarakat. Agar bank dapat beroperasi secara sehat, bank harus melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Penerapan GCG di sektor perbankan diatur oleh Bank Indonesia selaku institusi tertinggi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan dunia perbankan di Indonesia. Pengaturan tersebut dilakukan dalam upaya menata kembali manajemen dan kegiatan perbankan di Indonesia agar dapat beroperasi secara sehat, sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan sektor riil. Untuk itu, *Good Corporate Governance* (GCG) pada sektor perbankan sangat penting untuk diterapkan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 merupakan peraturan yang mengatur implementasi GCG oleh bank-bank komersial.<sup>3</sup>

Sistem ekonomi yang bebas dan terbuka saat ini menjadi lebih kompleks, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperhatikan kepentingan *shareholders*, tetapi juga para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Semakin kompleksnya aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola usaha yang baik (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Dengan memberikan prioritas terhadap perbaikan penerapan *corporate governance*, perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan perbankan dapat mengarah kepada peningkatan kinerja. Perusahaan yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan keyakinan pelanggan dan memperoleh kepercayaan dari pasar.

---

<sup>3</sup> Sukrisno Agoes, *Etika Bisnis dan Profesi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 118.

Sehubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik, komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Bapepam melalui surat edaran No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Komite audit lebih lanjut diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit.

Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia, Muliaman Hadad, komite audit merupakan lapis pertama dunia perbankan dalam menghadapi kejahatan perbankan.<sup>4</sup> Komite audit di perusahaan dipandang sebagai persyaratan mekanisme pasar, dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, *auditing* serta sistem pengendalian yang lainnya, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap berjalan secara optimal dalam sistem ekonomi pasar. Oleh karena itu keberadaan komite audit untuk saat ini telah diterima sebagai bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek implementasi *good corporate governance*. Komite audit sering digambarkan sebagai mekanisme *monitoring* yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya manajemen perusahaannya lebih transparan dan terbuka (*open*),

---

<sup>4</sup> Zis, Banyak Komite Audit Tak Punya Program Kerja, 2011, hlm. 1, (<http://akuntanonline.com/?p=692>)

sehingga prinsip *good corporate governance* dapat lebih diterapkan dengan baik.

Selain itu, kebijakan Bank Indonesia yang mengharuskan bank untuk mengalokasikan 5% dari biaya tenaga kerja untuk pelatihan merupakan kebijakan yang tepat. Fakta ini memperkuat pendapat bahwa kinerja bank juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga perbankan harus lebih banyak lagi mengalokasikan biaya untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi di kalangan karyawannya. Menonjolnya faktor SDM terutama terkait dengan aspek kepemimpinan. Keberhasilan kinerja bank akan dicapai jika didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Namun, harus diakui bahwa bankir-bankir yang andal di Indonesia, khususnya dalam aspek kepemimpinan yang kuat, belum tersedia dalam jumlah yang memadai.<sup>5</sup> Budaya perusahaan yang kondusif juga menjadi tantangan lain dalam mencapai kinerja bank yang optimal. Budaya perusahaan sangat berpengaruh terhadap produktivitas pelayanan yang diberikan oleh karyawan bank terhadap nasabah dan merupakan sumber dari kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengambil judul **“Hubungan Antara Komite Audit Dengan Kinerja Keuangan Perbankan Indonesia”**.

---

<sup>5</sup>Eko Budiwiyono, Kebijakan Konsolidasi dan Kinerja Perbankan Indonesia, 2011, hlm. 2, (<http://infobanknews.com>) (diakses 6 Mei 2012).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan sebagai berikut:

1. Biaya operasional perbankan masih tinggi,
2. Pertumbuhan dana publik (investor/nasabah) belum signifikan,
3. Lemahnya *internal control*,
4. Terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan perbankan,
5. Keberadaan komite audit dalam struktur *corporate governance*, dan
6. Kualitas sumber daya manusia (SDM).

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata kinerja keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk itu pembatasan masalah diperlukan agar mempermudah arah dan maksud penelitian sehingga diperoleh penelitian yang jelas. Dalam penelitian ini, masalah dibatasi hanya pada hubungan antara keberadaan komite audit terhadap kinerja keuangan bank devisa di Indonesia.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan akan menciptakan *corporate governance internal* yang baik. Semakin efektif keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan maka akan mampu mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Komite audit

diukur dengan jumlah satuan orang yang menduduki jabatan komite audit dalam suatu perusahaan.

Kinerja keuangan diukur dengan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Kinerja keuangan bank yang baik tercermin dalam rasio BOPO yang rendah, yang berarti bank mampu menciptakan sistem perbankan yang efisien.

#### **D. Perumusan Masalah**

Penggunaan rasio BOPO diperuntukan untuk menilai seberapa besar tingkat efisiensi biaya operasional bank, karena efisiensi biaya operasional bank merupakan pengukuran dari kinerja bank yang baik. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan penelitian adalah “Apakah ada hubungan yang positif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan perbankan?”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak yang terkait yaitu:

##### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran seberapa besar hubungan jumlah komite audit dengan kinerja keuangan perbankan.

## 2. Bagi Institusi Perbankan

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pengendalian internal perbankan terkait dengan keberadaan komite audit untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan.

## 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengukuran komite audit dan kinerja keuangan perbankan dengan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).